

## **DARI TPS KE TAHANAN: ALARM ETIK DEMOKRASI DI BALIK PENANGKAPAN KEPALA DAERAH PRODUK PILKADA 2024**

*Oleh-Al zakhy SMA Negeri 2 Painan*

Pada Februari 2025, publik menyaksikan pelantikan serentak kepala daerah hasil Pilkada 2024 sebagai simbol keberhasilan demokrasi elektoral Indonesia. Namun, euforia itu tak berlangsung lama. Hingga April 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sedikitnya sebelas kepala daerah yang baru saja memperoleh mandat rakyat telah tersangkut kasus korupsi. Fakta ini bukan sekadar catatan hukum, melainkan alarm etik bagi demokrasi Indonesia: bagaimana proses pemilu yang seharusnya melahirkan pemimpin berintegritas justru kembali dihadapkan pada persoalan moral dan tata kelola kekuasaan. Di tengah harapan terhadap pemilu yang jujur dan adil sebagai fondasi masa depan bangsa, rangkaian penangkapan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar apakah kualitas demokrasi kita telah benar-benar menjamin lahirnya kepemimpinan yang bersih dan bertanggung jawab kepada rakyat?

Fenomena tersebut menempatkan kembali isu integritas pemilu sebagai perhatian utama dalam demokrasi Indonesia. Tulisan ini menelusuri bagaimana proses politik elektoral, mulai dari tahapan pencalonan, kampanye, hingga pengawasan penyelenggaraan pemilu, berkontribusi terhadap kualitas kepemimpinan yang dihasilkan. Dengan menghimpun data penegakan hukum, pandangan penyelenggara pemilu, serta perspektif pengamat demokrasi, laporan ini mencoba membaca hubungan antara praktik pemilu yang jujur dan adil dengan munculnya pemimpin daerah yang berintegritas. Lebih dari sekadar mencatat kasus korupsi, kajian ini mengangkat pertanyaan mendasar: sejauh mana sistem pemilu mampu menjaga etika demokrasi sekaligus memastikan setiap suara rakyat benar-benar melahirkan masa depan Indonesia yang lebih bersih dan akuntabel?

Pilkada Serentak 2024 menjadi salah satu pesta demokrasi lokal terbesar dalam sejarah Indonesia, melibatkan ratusan daerah dengan jutaan pemilih yang menaruh harapan pada perubahan di tingkat pemerintahan daerah. Pemilu lokal ini dirancang sebagai mekanisme demokratis untuk menghadirkan pemimpin yang dekat dengan rakyat sekaligus responsif terhadap kebutuhan daerah. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa tingginya biaya politik, praktik mobilisasi dukungan yang transaksional, serta lemahnya pendidikan politik masyarakat masih menjadi tantangan serius dalam menjaga kualitas pemilu. Dalam konteks tersebut, penangkapan

kepala daerah pascapelantikan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum individu, tetapi juga sebagai refleksi dari persoalan sistemik yang menuntut evaluasi mendalam terhadap integritas proses pemilu dan pengawasan etika penyelenggaraannya.

Sejumlah pihak menilai bahwa kualitas pemilu tidak hanya diukur dari kelancaran teknis penyelenggaraan, tetapi juga dari integritas aktor yang terlibat di dalamnya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa etika merupakan fondasi utama demokrasi elektoral, karena kepercayaan publik terhadap hasil pemilu bergantung pada proses yang transparan dan berkeadilan. Pengamat politik dan tata kelola pemerintahan juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan sejak tahap pencalonan hingga masa kampanye, termasuk transparansi pendanaan politik dan rekam jejak kandidat. Tanpa sistem pengawasan etik yang kuat, pemilu berisiko hanya menjadi prosedur administratif lima tahunan yang belum sepenuhnya menjamin hadirnya kepemimpinan daerah yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dampak dari persoalan integritas kepala daerah tidak berhenti pada proses hukum semata, melainkan turut dirasakan langsung oleh masyarakat. Program pembangunan yang tertunda, ketidakpastian arah kebijakan daerah, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Ketika pemimpin hasil pemilu tersandung kasus korupsi dalam waktu singkat setelah dilantik, masyarakat mempertanyakan nilai suara yang telah mereka berikan di bilik TPS. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemilu yang jujur dan adil bukan hanya persoalan prosedur demokrasi, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan publik, keberlanjutan pembangunan daerah, serta harapan rakyat terhadap pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab di masa depan.

Sejumlah analis demokrasi menilai bahwa persoalan integritas kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari tingginya biaya politik dalam kontestasi elektoral. Kompetisi yang semakin kompetitif mendorong kandidat mengeluarkan sumber daya besar sejak tahap pencalonan hingga kampanye, sementara mekanisme transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik masih menghadapi berbagai keterbatasan. Di sisi lain, praktik politik yang berorientasi pada popularitas jangka pendek sering kali menggeser pembahasan substansi program dan rekam jejak kandidat. Situasi tersebut menciptakan ruang kompromi etika yang berpotensi memengaruhi kualitas kepemimpinan setelah pemilu berlangsung. Dalam konteks ini, pemilu yang jujur dan adil tidak

hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada budaya politik yang menempatkan integritas sebagai nilai utama dalam proses demokrasi.

Dalam upaya menjaga kualitas demokrasi, peran penyelenggara pemilu menjadi faktor kunci dalam memastikan proses elektoral berjalan sesuai prinsip jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tanggung jawab tidak hanya pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada penjagaan integritas dan etika seluruh tahapan pemilu. Penguatan mekanisme pengawasan, penegakan kode etik, serta transparansi informasi kepada publik menjadi langkah penting untuk mencegah pelanggaran sejak dini. Keberadaan lembaga etik seperti DKPP menunjukkan bahwa demokrasi tidak semata-mata berbicara tentang kemenangan politik, melainkan tentang menjaga kepercayaan rakyat melalui proses yang bersih, profesional, dan akuntabel.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, partisipasi masyarakat menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun pemilu berintegritas. Pemilih tidak lagi sekadar berperan sebagai pemberi suara, tetapi juga sebagai pengawas sosial yang menentukan arah kualitas demokrasi. Kesadaran untuk memilih berdasarkan rekam jejak, integritas, serta kapasitas kepemimpinan kandidat menjadi faktor penting dalam memutus rantai politik transaksional. Pendidikan politik yang inklusif, literasi demokrasi di kalangan pemilih muda, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu dinilai mampu memperkuat kontrol publik terhadap proses elektoral. Dengan partisipasi yang kritis dan bertanggung jawab, pemilu tidak hanya menghasilkan pemenang politik, tetapi juga memperkuat legitimasi demokrasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Rangkaian peristiwa yang terjadi pascapelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak berhenti pada hari pemungutan suara. Pemilu yang jujur dan adil harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi etika, akuntabilitas kekuasaan, serta pengawasan publik yang kuat setelah pemimpin terpilih menjalankan mandatnya. Evaluasi terhadap sistem pencalonan, transparansi pendanaan politik, hingga pendidikan demokrasi bagi masyarakat menjadi langkah strategis untuk memastikan pemilu benar-benar melahirkan kepemimpinan yang berintegritas. Tanpa perbaikan menyeluruh,

demokrasi berisiko kehilangan esensinya sebagai sarana menghadirkan pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pemilu diselenggarakan, melainkan oleh seberapa kuat integritas dijaga dalam setiap tahapannya. Penangkapan kepala daerah hasil Pilkada 2024 menjadi pelajaran penting bahwa suara rakyat harus dilindungi tidak hanya saat berada di bilik suara, tetapi juga dalam praktik kekuasaan setelah pemilu usai. Pemilu yang jujur dan adil merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, karena dari proses yang beretika lahir kepemimpinan yang dipercaya publik. Ketika penyelenggara pemilu, peserta kontestasi, dan masyarakat sama-sama menempatkan etika sebagai fondasi demokrasi, maka pemilu tidak sekadar menghasilkan pemenang politik, melainkan menghadirkan harapan baru bagi Indonesia yang lebih bersih, adil, dan bermartabat.